

LAPORAN MAGANG

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR SERTA ADMINISTRASI
KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Clarisa Zaski Andriani

112131623

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

FEBERUARI – MEI

2025

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

LAPORAN MAGANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR SERTA ADMINISTRASI KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

CLARISA ZASKI ANDRIANI

Nomor Induk Mahasiswa: 112131623

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Baldric Siregar, Prof. Dr, MBA, CMA, Ak, CA.

Penguji

Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 9 Juli 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman magang yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama periode Februari hingga Mei 2025. Selama kegiatan magang, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas administrasi seperti pengelolaan arsip, pelayanan penerimaan retribusi parkir, serta pencatatan karcis. Ditemukan beberapa kendala seperti miskomunikasi terkait perhitungan retribusi parkir dan kurangnya pemahaman terhadap alur kerja yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan dalam komunikasi antara pembimbing dan peserta magang serta penyusunan dokumentasi yang lebih jelas. Magang ini memberikan pengalaman yang berharga dalam penerapan teori yang dipelajari selama perkuliahan dan meningkatkan keterampilan praktis dalam dunia kerja.

Kata kunci: magang, Dinas Perhubungan, retribusi parkir, miskomunikasi, alur kerja

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This report aims to describe the internship experience carried out at the Transportation Department of Yogyakarta City from February to May 2025. During the internship, the author was involved in various administrative activities such as archive management, parking fee receipt services, and ticket recording. Several challenges were identified, such as miscommunication regarding parking fee calculations and a lack of understanding of the existing work processes. To address these issues, improvements in communication between mentors and interns, as well as clearer documentation, are needed. This internship provided valuable experience in applying theories learned during lectures and enhanced practical skills in the workplace.

Keywords: internship, Transportation Department, parking fees, miscommunication, work process

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Latar Belakang

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat untuk melaksanakan magang dan menambah pengalaman baru. Dalam Program studi S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, magang menjadi salah satu opsi untuk memenuhi persyaratan mata kuliah tugas akhir guna meraih gelar sarjana. Bobot satuan kredit untuk magang ini adalah 6 SKS. Magang merupakan kegiatan yang identic dengan suatu pelatihan, percobaan, dan suatu metode pembelajaran yang melibatkan seseorang secara langsung dalam suatu lingkungan kerja.

Pengetahuan teori saja tidak cukup untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif saat ini. Untuk itu, dengan memilih magang menjadi langkah yang tepat dan pengalaman yang baik untuk saya menerapkan ilmu yang sudah saya dapat dengan terjun langsung ke lapangan. Bentuk kegiatan dari magang sendiri dimiliki dengan waktu 66 hari atau kurang lebih sekian bulan sesuai dengan bidang ilmu yang relevan dengan Program Studi Akuntansi.

Profil Tempat Magang

Dinas Perhubungan Yogyakarta mempunyai sejarah yang panjang dalam pengelolaan transportasi di wilayah Yogyakarta. Sedari didirikan, Dinas ini telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pada awalnya, Yogyakarta mengelola transportasi melalui akuntansi yang berkonsentrasi pada infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Namun, karena kebutuhan akan transportasi yang lebih kompleks, didirikan lembaga khusus yang menangani berbagai aspek transportasi darat, laut, dan udara. Pada pertengahan abad ke-20, setelah Indonesia memiliki kemerdekaan, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta didirikan sebagai lembaga resmi dengan tujuan utama mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi dan mendukung pembangunan daerah.

Dinas Perhubungan Yogyakarta awalnya berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur jalan dan pengelolaan angkutan darat untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Namun, karena posisi strategis Yogyakarta sebagai pintu gerbang barat Indonesia, perhatian mulai bergeser ke pengembangan transportasi laut dan udara.

Selama bertahun-tahun, Dinas Perhubungan Yogyakarta telah melalui berbagai tantangan, termasuk konflik sosial dan bencana alam seperti tsunami 2004, yang mempengaruhi infrastruktur transportasi di wilayah ini. Pasca bencana, Dinas ini memainkan peran penting dalam rehabilitasi dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rekonstruksi transportasi, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak.

Dengan perkembangan teknologi, Dinas Perhubungan Yogyakarta terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik, seperti penerapan sistem transportasi berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan layanan kepada masyarakat. Saat ini, Dinas Perhubungan Yogyakarta berkomitmen untuk mewujudkan sistem transportasi yang modern, aman, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi Yogyakarta sebagai wilayah yang maju dan terhubung dengan baik.

Aktivitas Magang

1. Pencatatan Rekapitulasi Pengeluaran

Rekapitulasi merupakan pengelolaan data atau informasi dari hasil akumulasi yang telah dilakukan, kemudian diringkas dan ditindak lanjuti dalam bentuk sederhana dan jelas dalam bentuk excel. Dalam pengelolaan data tersebut penulis memasukan format: nama, tanggal dan tahun disahkan, dan nomor surat. Penulis melakukan rekapitan dari tahun 2010 sampai dengan 2016 data tersebut akan di musnahkan. Setelah itu, penulis melakukan rekapitan arsip, dokumennya di berikan kepada kepala bagian keuangan untuk di koreksi kembali.

2. Tata Cara Penerapan Tugas Juru Parkir Pada Sektor Perparkiran

Pada kerja ini, penulis menjelaskan proses administrasi setoran parkir oleh juru parkir (jukir) dilakukan dengan mencatat keluar karcis setiap hari sesuai dengan jumlah setoran yang telah ditentukan. Karcis yang dikeluarkan memiliki warna yang berbeda, masing-masing dengan fungsi tertentu: kertas biru sebagai tanda bukti setoran yang diserahkan ke bank BPD, kertas hijau untuk wilayah I, II dan III sebagai bukti pengeluaran karcis, dan kertas putih sebagai tanda bukti bagi hasil parkir yang dihitung berdasarkan kawasan. Perbedaan antara Tempat Khusus Parkir(TKP) dan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) yaitu: di TKP area parkir sudah disediakan secara khusus di luar badan jalan seperti bangunan atau lahan. Untuk contoh lokasinya ada di gedung parkir, besment mal atau pusat perbelanjaan, are parkir pasar, terminal atau kantor pemerintah. TKP dikelola oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama. Sedangkan TJU area parkir yang dilakukan di sisi badan jalan umum yang sudah ditetapkan sebagai lokasi parkir resmi oleh pemerintah. Untuk contoh lokasinya ada di jalan malioboro, jalan margo utomo, dan urip sumoharjo. TJU dikelola langsung di bawah Dinas Perhubungan atau melalu jalur parkir resmi. Setiap wilayah memiliki kode warna yang memudahkan identifikasi, dengan kuning untuk wilayah I, merah muda untuk wilayah II, dan hijau untuk wilayah III. Data dari kertas-kertas tersebut kemudian direkap oleh karyawan di bidang perparkiran, dimasukkan ke dalam sistem Excel, dan diajukan kepada pihak keuangan untuk verifikasi serta pembagian hasil, sehingga memastikan sistem pengelolaan setoran parkir berjalan dengan transparan dan efisien. Ditahun 2024 pendapatan yang diperoleh Dinas Perhubungan Kota

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Yogyakarta sebesar 25% dari total retribusi parkir dan sisanya 75% masuk ke daerah (Pemerintah Kota Yogyakarta).

3. Pelayanan Penerimaan Retribusi Oleh Juru Parkir

Pada kerja ini, penulis menerima retribusi yang dilakukan oleh juru parkir pada setiap bulannya dan penulis menanyakan kepada juru parkir untuk penyetoran bulan apa dan karcis kendaraan mobil atau motor. Setelah itu, penulis meminta tanda tangan juru parkir tersebut sebagai bukti kalau juru parkir sudah menerima karcis parkir. Untuk pengawasan parkir di setiap wilayah Dinas Perbuhungan Kota Yogyakarta mengadakan operasi rutin seperti mengecek perlengkapan juru parkir, contoh: mendapat seragam, surat perizinan dan karcis. Selain itu, kegiatan lainnya seperti sosialisasi pada juru parkir tentang perizinan dan pengelolaan parkir khusus agar sesuai dengan peraturan dan kewajiban yang ada. Pengajuan izin parkir harus menggunakan aplikasi digital seperti Jogja Smart Service.

LANDASAN TEORI

3.1 Perpajakan

Perpajakan merupakan proses pemungutan iuran wajib oleh negara kepada warga negara dan badan usaha berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengatur (regulerend) dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional, termasuk di sektor transportasi. Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pemerintah yang mengelola sistem transportasi publik, memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibiayai melalui penerimaan perpajakan, seperti pembangunan jalan, pengujian kendaraan, dan subsidi transportasi publik (Björklund Larsen & Boll, 2021).

Keterkaitan antara perpajakan dan Dinas Perhubungan dapat terlihat dari penerapan berbagai jenis pajak sektor transportasi, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, serta retribusi jasa transportasi. Hasil dari pungutan ini digunakan untuk membiayai layanan transportasi, pembangunan infrastruktur jalan, pengujian kendaraan, hingga program keselamatan lalu lintas. Misalnya, di Kabupaten Subang, kebijakan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sangat bergantung pada dana dari sektor pajak dan retribusi (Natika & Putri, 2021). Oleh karena itu, pemahaman tentang perpajakan menjadi penting bagi pelaksana teknis di Dinas Perhubungan untuk menjamin efektivitas program transportasi yang berkelanjutan.

3.2 Manajemen Keuangan

Pengarsipan dokumen keuangan seperti Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sangat penting dalam manajemen keuangan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan anggaran di instansi seperti Dinas Perhubungan. Proses pengelolaan dokumen tersebut tidak hanya memastikan transparansi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran. SPM berfungsi untuk memastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, sementara SPJ digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan. Manajemen dokumen yang baik juga berperan dalam memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Integrasi antara dokumen-dokumen tersebut dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memandu pengelolaan anggaran menjadi kunci dalam menjaga efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran (Keakopa, 2018). Sistem yang terintegrasi dengan baik membantu meminimalisir kesalahan dalam administrasi anggaran dan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah (Riska Latifa Alauddin Nur & Tuti Dharmawati, 2024).

Selain itu, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan di Dinas Perhubungan, terutama terkait dengan pengeluaran anggaran yang sesuai dengan perencanaan dalam RKA dan DPA. Dengan transparansi, publik dapat mengakses informasi keuangan dengan mudah, yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, diharapkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola anggaran serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dan akurat. Hal ini akan mendorong akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran (Rizki Inmas Pratiwi, Hali ah, & Andi Kusumawati, 2024). Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, diperlukan juga sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan, termasuk dokumen-dokumen terkait seperti SPM, SPJ, RKA, dan DPA dalam satu platform yang efisien.

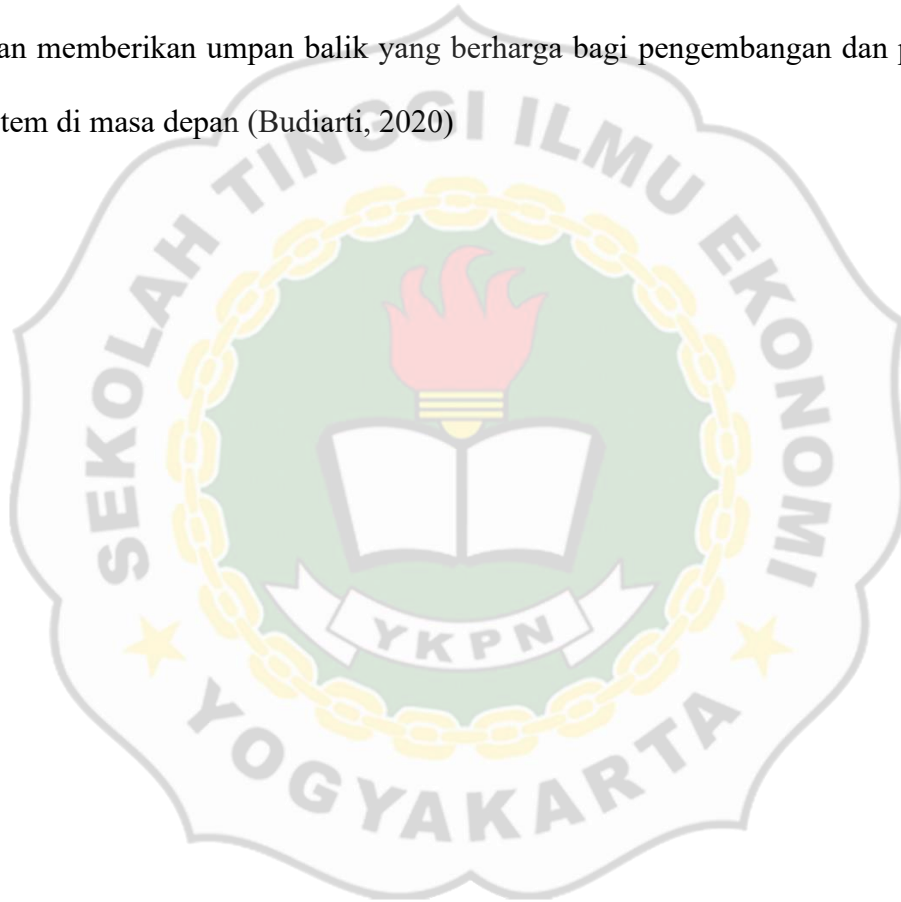
3.3 Audit Internal

Audit internal di Dinas Perhubungan berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan sumber daya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Fungsi audit internal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari sistem manajemen dan pengawasan yang ada, serta mendeteksi potensi penyimpangan yang dapat merugikan organisasi. Dalam konteks Dinas Perhubungan, audit internal tidak hanya mencakup pemeriksaan terhadap laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan prosedur operasional dalam bidang transportasi dan infrastruktur perhubungan berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Situmorang, 2019).

Selain itu, audit internal di Dinas Perhubungan juga berfungsi untuk memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan-temuan yang ada. Temuan ini bisa berkaitan dengan penggunaan anggaran, kinerja pegawai, maupun kepatuhan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan adanya audit internal, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Audit internal yang dilakukan secara berkala akan memberikan umpan balik yang berharga bagi pengembangan dan perbaikan sistem di masa depan (Budiarti, 2020)



ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Permasalahan

Selama tiga bulan menjalani kegiatan magang di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu :

4.1.1 Miskonumikasi dalam hal Tempat Khusus Parkir (TKP)

Pada bulan kedua, minggu ketiga, penulis ditempatkan di bidang perparkiran yang bertanggung jawab atas pelayanan penerimaan retribusi, pencatatan penerimaan retribusi, serta pencatatan karcis keluar. Pada tahap awal penugasan, penulis baru pertama kali terlibat dalam proses penerimaan retribusi parkir. Di lokasi tersebut, terdapat juru parkir yang berasal dari Tempat Khusus Parkir (TKP). Penulis mengalami kesulitan dalam memahami perhitungan retribusi antara wilayah parkir biasa dan TKP. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan penjelasan dari karyawan di bidang perparkiran mengenai cara perhitungan tersebut. Kesalahan dalam perhitungan terjadi ketika juru parkir TKP hendak melakukan pembayaran. Setelah beberapa kali melakukan tanya jawab, penulis akhirnya memperoleh penjelasan yang lebih jelas dan memahami tata cara perhitungan retribusi TKP yang sebenarnya sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan oleh salah satu karyawan di bidang perparkiran tersebut. Berdasarkan peraturan yang berlaku, perhitungan retribusi di TKP harus memperhatikan tarif yang telah ditetapkan oleh instansi terkait, yang berbeda dengan tarif pada parkir biasa.

4.1.2 Kurang Memahami Alur Kerja Saat Kegiatan Magang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kurang memahami alur kerja saat kegiatan magang di Dinas Perhubungan Yogyakarta dapat disebabkan oleh ketidakjelasan informasi terkait proses-proses yang harus dilalui oleh peserta magang. Berdasarkan observasi awal, peserta magang cenderung tidak diberikan gambaran yang komprehensif mengenai tugas dan tanggung jawab mereka sejak awal, yang berdampak pada kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang kompleks. Alur kerja yang melibatkan berbagai departemen dan fungsi seperti pengawasan lalu lintas, manajemen transportasi, dan pelayanan publik mewajibkan pemahaman yang mendalam mengenai interrelasi antar proses. Tanpa adanya panduan atau dokumentasi yang jelas mengenai tahapan pekerjaan, peserta magang sering kali mengalami kebingungan dalam menentukan prioritas tugas dan menilai tujuan dari setiap aktivitas yang mereka lakukan selama masa magang.

Selain itu, ketidakjelasan dalam komunikasi antara pembimbing magang dan pihak Dinas Perhubungan turut memperburuk kebingungan tersebut. Komunikasi yang terbatas atau tidak terstruktur dengan baik mengakibatkan peserta magang kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai prioritas tugas atau penugasan yang harus diselesaikan. Ketiadaan mekanisme komunikasi yang rutin dan sistematis antara peserta magang dan pembimbing magang menjadikan peserta magang tidak mengetahui siapa yang dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi permasalahan tertentu. Hal ini menyebabkan alur kerja menjadi kabur dan tugas-tugas yang diberikan sering kali tumpang tindih, sehingga peserta magang merasa kesulitan dalam memetakan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, ketiadaan umpan balik yang teratur dan evaluasi terhadap

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

progres kerja peserta magang menghambat pemahaman mereka mengenai pencapaian tujuan yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan.

4.2 Pembahasan Permasalahan

Dalam penyusunan laporan magang ini, penulis berusaha untuk memberikan solusi dan rekomendasi yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan selama masa magang. Penulis juga mengacu pada berbagai teori yang relevan untuk memperdalam pemahaman dan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai isu-isu yang muncul selama proses magang.

4.2.1 Pembahasan Masalah Miskomunikasi

Masalah kebingungan dalam memahami alur kerja selama kegiatan magang di Dinas Perhubungan Yogyakarta disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas dan terstruktur mengenai proses-proses yang harus dilalui, serta ketidakjelasan komunikasi antara pembimbing magang dan peserta magang. Alur kerja yang kompleks, melibatkan berbagai departemen dan fungsi, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antar proses, yang sering kali tidak disampaikan dengan baik. Selain itu, terbatasnya umpan balik dan evaluasi juga membuat peserta magang kesulitan dalam menilai progres mereka. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar pihak Dinas Perhubungan menyediakan panduan atau dokumentasi yang jelas mengenai alur kerja dan tugas yang harus dilaksanakan oleh peserta magang. Pembimbing magang juga perlu menjalin komunikasi yang lebih terstruktur dan rutin dengan peserta magang, serta memberikan umpan balik secara berkala untuk memastikan pemahaman yang tepat. Dengan adanya evaluasi dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengawasan yang lebih sistematis, peserta magang akan lebih mudah mengikuti alur kerja dan mencapai tujuan yang diinginkan, sekaligus meningkatkan efektivitas kegiatan magang secara keseluruhan.

4.2.2 Pembahasan Masalah Kurang Memahami Alur Kerja

Sebagai penulis yang menjalani kegiatan magang di Dinas Perhubungan Yogyakarta, saya kurang memahami alur kerja yang harus dilalui selama masa magang. Kebingungan ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas dan terstruktur mengenai tahapan dan proses yang harus saya jalani. Alur kerja yang melibatkan berbagai departemen dan fungsi, seperti pengawasan lalu lintas dan manajemen transportasi, memerlukan pemahaman mendalam tentang hubungan antar proses yang saling terkait, namun hal ini tidak disampaikan secara memadai. Selain itu, terbatasnya komunikasi antara saya dan pembimbing magang juga memperburuk masalah ini, karena saya sering kali merasa kesulitan dalam mengetahui prioritas tugas dan tidak mendapatkan arahan yang jelas mengenai pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk mengatasi hal ini, saya merekomendasikan agar Dinas Perhubungan Yogyakarta menyediakan panduan atau dokumentasi yang lebih terstruktur mengenai alur kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta magang. Selain itu, komunikasi yang lebih teratur dan jelas antara pembimbing magang dan peserta magang, serta pemberian umpan balik secara berkala, akan sangat membantu peserta magang dalam memahami dan mengikuti alur kerja dengan lebih efektif, sehingga tujuan magang dapat tercapai dengan baik.

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN REFLEKSI DIRI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama periode Februari – Mei 2025, dapat disimpulkan bahwa magang ini memberikan banyak manfaat bagi penulis, baik dari segi pengalaman kerja, keterampilan praktis, maupun pemahaman terkait dunia kerja. Selama magang, penulis terlibat langsung dalam berbagai aktivitas, termasuk pengelolaan arsip data, pelayanan penerimaan retribusi, serta pemahaman mengenai sistem pengelolaan transportasi di Yogyakarta. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam memahami alur kerja dan perhitungan retribusi, pengalaman ini memperkaya wawasan penulis terkait dengan penerapan teori yang telah dipelajari selama kuliah. Penulis juga menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan dokumentasi yang jelas dalam menjalankan suatu kegiatan, agar semua proses kerja berjalan dengan efisien.

5.2 Rekomendasi

Dari pengalaman penulis selama kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga penulis ingin memberikan beberapa saran agar menjadi bahan pertimbangan bagi kedua belah pihak.

Bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, disarankan agar Dinas Perhubungan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi, serta memastikan komunikasi yang lebih terstruktur dan jelas antara peserta magang dan pembimbing. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kebingungan dalam menjalankan tugas dan memahami alur kerja

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang ada. Selain itu, Dinas Perhubungan juga perlu memperjelas alur kerja dan prosedur yang harus diikuti, dengan menyediakan panduan yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh peserta magang. Pemberian umpan balik secara rutin akan sangat membantu peserta magang dalam mengevaluasi progres mereka dan mengetahui area yang perlu perbaikan.

Bagi Sekolah Tinggi Ilmu YKPN Yogyakarta

STIE YKPN Yogyakarta juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman magang mahasiswa. Untuk itu, disarankan agar kampus menyediakan kurikulum yang lebih terarah, yang mencakup keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Selain itu, penting bagi kampus untuk memperkuat kerjasama dengan instansi yang relevan, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman yang lebih sesuai dengan bidang studi yang mereka tekuni. Dukungan pembimbingan magang yang lebih intensif, baik dari sisi evaluasi maupun bimbingan langsung, akan membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan dunia kerja dan meningkatkan kualitas pengalaman magang mereka.

5.3 Refleksi Diri

Melalui kegiatan magang di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, penulis memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis belajar untuk menerapkan keterampilan praktis dan mengembangkan kemampuan komunikasi dengan berbagai pihak di dalam organisasi. Proses magang ini memberikan penulis kesempatan untuk memahami bagaimana prosedur dan alur kerja yang ada di lembaga ini berjalan, serta

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bagaimana berinteraksi dengan berbagai departemen yang terlibat dalam pengelolaan transportasi.

Selama magang, penulis juga mengembangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan data dan retribusi, yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas operasional di Dinas Perhubungan. Meskipun ada beberapa tantangan, seperti ketidakjelasan alur kerja dan miskomunikasi dalam perhitungan retribusi, pengalaman tersebut memberikan wawasan tentang pentingnya sistem komunikasi yang jelas serta dokumentasi yang terstruktur dalam sebuah organisasi.

Pengalaman ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis untuk menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Penulis merasa semakin percaya diri dan siap untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam karier profesional. Dengan kemampuan yang semakin berkembang, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam bidang yang relevan dengan pendidikan dan pengalaman yang telah dijalani selama magang.

DAFTAR PUSTAKA

- Björklund Larsen, L., & Boll, K. (2021). Taxation. In *Oxford Research Encyclopedia of Anthropology*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190854584.013.520>
- Budiarti. (2020). *Pentingnya Audit Internal untuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan.
- Keakopa, S. M. (2018). Management of financial records in selected public institutions in Botswana. *Journal of South African Society of Archivists*, 51(1), 1–33.
- Natika, L., & Putri, G. N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 3(1), 26–38.
<https://doi.org/10.37950/wpaj.v3i1.1077>
- Riska Latifa Alauddin Nur, & Tuti Dharmawati. (2024). Analysis of the Performance of Regional Government Treasurers in Compiling Reports and Accountability. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(12), 294–311. <https://doi.org/10.62504/jimr1112>
- Rizki Inmas Pratiwi, Hali ah, & Andi Kusumawati. (2024). The Influence of Transparency, Governance, and Financial Accountability in Managing Financial Reporting in the Public Sector. *International Journal of Educational and Life Sciences*, 2(10), 1165–1180.
<https://doi.org/10.59890/ijels.v2i10.2571>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Situmorang. (2019). *Audit Internal dalam Pemerintahan: Konsep dan Penerapan pada Instansi Pemerintah*. Penerbit Buku Ilmu Pemerintahan.

